

KRISIS EKONOMI DAN KONDISI MASYARAKAT TAHUN 1965-1966**Desi Alya¹, Febi Yanti², Muhammad Rafi Rizki Rahman³, Eko Ribawati⁴**Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jl. Raya Ciwaru No. 25
Serang BantenEmail : 2288230010@untirta.ac.id**Abstrak**

Kondisi perekonomian yang buruk menjadi salah satu alasan Demokrasi Terpimpin (1959-1965) gagal di Indonesia. Kondisi ekonomi kala itu menjadi salah satu kondisi terburuk dalam catatan sejarah Indonesia. Pada masa Demokrasi Terpimpin, Indonesia baru 15 tahun merdeka. Perekonomian masih sangat lemah. Kondisi politik saat itu masih bergejolak. Berbagai pemberontakan terjadi di daerah. Pemberontakan dan gejolak ini membuat aktivitas perekonomian terganggu. Peristiwa 1965 menjadi salah satu catatan hitam Indonesia. Di tahun tersebut, banyak warga mengalami kekerasan, baik dari militer maupun unsur sipil yang disponsori oleh militer. Peristiwa ini diawali dengan penculikan dan pembunuhan para Jendral pada 30 September 1965 (G30S). Partai Komunis Indonesia (PKI) dituding keras menjadi pelaku penculikan dan pembunuhan dalam peristiwa tersebut. Di Jawa, banyak pembunuhan dilakukan oleh simpatisan aliran. Militer mendorong para santri Jawa untuk mencari anggota PKI di antara orang-orang abangan Jawa. Pembunuhan meluas sampai pada orang-orang yang bukan anggota PKI. Becermin dari melebarnya perbedaan sosial di seluruh Indonesia pada 1950-an dan awal 1960-an, di pulau Bali meletus konflik antara para pendukung sistem kasta tradisional Bali melawan orang-orang yang menolak nilai-nilai tradisional itu. Peristiwa Krisis Nasional 1965 menempatkan PKI dan juga pendukungnya sebagai pihak yang kemudian mengalami penghancuran baik oleh pihak aparat keamanan yang mendukung pihak AD dan juga dari musuh-musuh politik PKI di kalangan organisasi Islam yang selama tahun 1960-an mengalami penggayangan oleh PKI.

Kata kunci : Krisis ekonomi, Pemberontakan, PKI, Kondisi masyarakat, Jawa, Bali, Krisis Nasional

Abstrac

Poor economic conditions were one of the reasons Guided Democracy (1959-1965) failed in Indonesia. The economic condition at that time was one of the worst conditions in Indonesia's recorded history. During the Guided Democracy era, Indonesia had only been independent for 15 years. The economy is still very weak. The political conditions at that time were still volatile. Various rebellions occurred in the area. This rebellion and turmoil disrupted economic activity. The 1965 incident became one of Indonesia's black records. In that year, many residents experienced violence, both from the military and civilian elements sponsored by the military. This event began with the kidnapping and murder of the Generals on September 30 1965 (G30S). The Indonesian Communist Party (PKI) was strongly accused of being the perpetrator of the kidnapping and murder in this incident. In Java, many murders were carried out by sect sympathizers. The military encouraged Javanese Islamic students to look for PKI members among the Javanese abangan people. The killings spread to people who were not members of the PKI. Reflecting the widening social differences throughout Indonesia in the 1950s and early 1960s, on the island of Bali conflict erupted between supporters of the traditional Balinese caste system and those who rejected those traditional values. The 1965 National Crisis incident placed the PKI and its supporters as parties who then experienced destruction both by the security forces who supported the Army and also by the PKI's political enemies among Islamic organizations which during the 1960s experienced being crushed by the PKI.

Key words: Economic crisis, Rebellion, PKI, Condition of society, Java, Bali, National Crisis

PENDAHULUAN

Sejarah Indonesia (1965-1966) adalah masa Transisi ke Orde Baru, masa di mana pergolakan politik terjadi di Indonesia di pertengahan 1960-an, digulingkannya presiden pertama Indonesia, Soekarno setelah 21 tahun menjabat. Periode ini adalah salah satu periode paling penuh gejolak dalam sejarah modern Indonesia. Periode ini juga menandakan dimulainya 32 tahun masa kepemimpinan Soeharto. Digambarkan bagi "dalang" akbar, Soekarno mendapatkan kekuasaan dari usahanya menyeimbangkan daya yang berlawanan dan makin bermusuhan selang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada tahun 1965, PKI telah menembus semua tingkat pemerintahan, mendapatkan pengaruh akbar dan juga mengurangi kekuasaan TNI. Tentara telah terbagi, selang sayap kiri yang pro-PKI, dan sayap kanan yang didekati oleh negara-negara Barat.

Pada tanggal 30 September 1965, enam perwira paling senior TNI tewas dalam suatu sikap yang dibuat yang dinamakan "Gerakan 30 September", suatu kumpulan dari dalam TNI sendiri. Sikap yang dibuat ini kesudahan dicap oleh pemerintahan Soeharto bagi "percobaan kudeta". Dalam sebagian jam, Mayor Jenderal Soeharto memobilisasi pasukan di bawah komandonya dan menguasai Jakarta. Golongan anti komunis, yang awalnya mengikuti perintah TNI, melanjutkan pembersihan berdarah dari komunis di semua negeri, diperkirakan menewaskan setengah juta orang, dan menghancurkan PKI, yang secara resmi telah disalahkan atas krisis tersebut oleh Soeharto. Soekarno yang telah lemah secara politik kesudahan dikalahkan dan dipaksa kepada mentransfer daya kunci politik dan militer Indonesia pada Jenderal Soeharto, yang telah menjadi kepala tingkatan bersenjata Indonesia. Pada bulan Maret 1967, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) menyatakan bahwa Jenderal Soeharto adalah presiden Indonesia. Soeharto kesudahan resmi ditunjuk bagi presiden Indonesia satu tahun kesudahan. Soekarno hidup dalam tahanan rumah hingga kematiannya pada tahun 1970. Berlawanan dengan teriakan nasionalisme, retorika revolusi nasional, dan kegagalan-kegagalan ekonomi yang merupakan ciri awal 1960-an di bawah Soekarno, pemerintahan "Orde Baru" Soeharto yang pro-Barat menstabilkan ekonomi dan membuat pemerintahan pusat yang kuat. Banyak dipuji karena perkembangan ekonomi yang terjadi di Indonesia, Pemerintahan "Orde Baru" juga dikutuk karena catatan pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi yang tertinggi.

Soekarno, sebagai pemimpin nasionalis Indonesia, telah memproklamirkan kemerdekaan negara tersebut pada tahun 1945 dan ditunjuk sebagai presiden. Setelah berjuang dalam revolusi nasional melawan Belanda, mantan penjajah kolonial, Soekarno berhasil menyatukan Indonesia yang hampir terpecah. Namun, pemerintahannya belum berhasil menciptakan sistem ekonomi yang mampu mengentaskan rakyatnya dari kemiskinan ekstrem. Dia menerapkan kebijakan sosialis di dalam negeri dan kebijakan anti-imperialis di tingkat internasional, yang didukung oleh gaya kepemimpinan otoriter yang sangat bergantung pada karisma pribadinya. Kebijakan-kebijakan ini membawanya membentuk aliansi dengan Blok Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok, serta memprakarsai pembentukan Gerakan Non-Blok dari negara-negara pasca-kolonial di Konferensi Asia-Afrika. Kebijakan ini juga membentuk aliansi politik di dalam negeri dengan Partai Komunis Indonesia. Sejak akhir 1950-an, konflik politik dan penurunan ekonomi terus meningkat di Indonesia. Pada pertengahan 1960-an, pemerintahan Soekarno yang kekurangan dana harus menghapus subsidi untuk sektor-sektor publik yang penting, inflasi tahunan diperkirakan mencapai 500-1.000%, pendapatan ekspor menurun, infrastruktur rusak, dan pabrik-pabrik beroperasi dengan kapasitas minimal karena investasi yang diabaikan. Sementara kemiskinan ekstrem dan kelaparan semakin meluas, Soekarno memimpin Indonesia dalam konfrontasi militer dengan Malaysia sambil meningkatkan retorika revolusioner dan anti-Barat. Dalam media, Soekarno digambarkan sebagai "dalang" besar, dan posisi kekuasaannya sangat bergantung pada kemampuannya untuk menyeimbangkan kekuatan yang saling bertentangan dan semakin bermusuhan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Ideologi anti-imperialisme Soekarno kemudian membuat Indonesia semakin bergantung pada

dukungan dari Uni Soviet dan Tiongkok. Pada tahun 1965, di puncak Perang Dingin, PKI telah merambah semua tingkat pemerintahan Indonesia. Dengan dukungan dari Soekarno dan Angkatan Udara, PKI memperluas pengaruhnya dengan mengurangi kekuasaan militer, yang memicu permusuhan dari pihak militer. Pada akhir 1965, TNI telah terbagi antara faksi sayap kiri yang pro-PKI, dan faksi sayap kanan yang sedang mendekati Amerika Serikat.

Soekarno, melalui kebijakannya, hanya berhasil memenangkan beberapa sekutu dan menciptakan lebih banyak antagonis di negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat dan Inggris Raya. Investor dari kedua negara ini merasa frustrasi dengan kebijakan Soekarno yang menasionalisasi aset-aset di sektor mineral, pertanian, dan energi. Dalam konteks Perang Dingin melawan Uni Soviet, Amerika Serikat berusaha menjalin hubungan dengan beberapa perwira militer TNI melalui berbagai pertukaran dan transaksi senjata. Langkah ini berujung pada perpecahan di dalam TNI, di mana Amerika Serikat dan sekutunya mendukung faksi sayap kanan TNI yang berlawanan dengan faksi sayap kiri TNI yang mendukung Partai Komunis Indonesia. Saat Soekarno menolak bantuan pangan dari USAID, yang berdampak pada memburuknya kondisi kelaparan, faksi sayap kanan TNI memilih untuk mengadopsi struktur komando regional. Melalui struktur ini, mereka dapat menyelundupkan bahan pangan untuk memenangkan hati penduduk pedesaan. Sebagai respons terhadap peningkatan kekuasaan faksi sayap kanan TNI, Partai Komunis Indonesia dan faksi sayap kiri TNI membentuk sejumlah organisasi massa petani dan lainnya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam makalah ini adalah metode penelitian sejarah yaitu studi kepustakaan/literatur (*library research*) dari berbagai sumber tertulis tentang sejarah Jepang kuno dan Konfusianisme di Jepang. Bahan-bahan rujukan utama dikumpulkan dari berbagai buku, jurnal, dan artikel ilmiah baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris yang relevan dengan topik ini. Berbagai sumber tertulis tersebut dikaji dengan analisis isi (*content analysis*) untuk mencari data dan informasi relevan terkait Krisis Ekonomi, Pemberontakan, PKI, Kondisi masyarakat, dan Krisis Nasional. Hasil analisis isi kemudian disintesis menjadi suatu uraian yang ringkas dan sistematis tentang Krisis Ekonomi, Pemberontakan, PKI, kondisi masyarakat, Jawa, Bali, dan Krisis Nasional. Studi kepustakaan dilakukan secara komprehensif untuk menghasilkan sintesis dan kesimpulan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi ini menekankan telaah kritis terhadap sumber rujukan dan kutipan langsung dari para ahli yang relevan untuk mendukung deskripsi dan analisis krisis ekonomi dan kondisi masyarakat tahun 1965-1966.

HASIL PEMBAHASAN

Krisis Ekonomi Tahun 1965-1966

Kondisi perekonomian yang buruk menjadi salah satu alasan Demokrasi Terpimpin (1959-1965) gagal di Indonesia. Kondisi ekonomi kala itu menjadi salah satu kondisi terburuk dalam catatan sejarah Indonesia. Beberapa masalah yang dihadapi yakni: Ekspor dan investasi merosot Menipisnya cadangan devisa Inflasi mencapai ratusan persen Harga kebutuhan pokok mahal Adapun penyebabnya antara lain: Indonesia baru merdeka Pemberontakan dan gejolak politik terjadi berulang kali Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara barat Anggaran negara dihamburkan untuk proyek politik Presiden Soekarno Kebijakan yang dikeluarkan gagal untuk menyelamatkan perekonomian.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, Indonesia baru 15 tahun merdeka. Perekonomian masih sangat lemah. Kondisi politik saat itu masih bergejolak. Berbagai pemberontakan terjadi di daerah. Pemberontakan dan gejolak ini membuat aktivitas perekonomian terganggu. Ekonomi terpimpin adalah sistem ekonomi di mana semua aktivitas ekonomi dipusatkan di pemerintah. Daerah hanya kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Pusat memegang

kekuasaan yang besar. Kewenangan Soekarno saat itu sangat besar. Kebijakannya untuk berkonfrontasi dengan Malaysia sejak 1961 berdampak pada perekonomian. Sikap keras itu diperparah dengan keputusan Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada 1965. Kegiatan ekspor pun terhenti. Akibatnya, sejak tahun 1961, negara harus terus membiayai kekurangan neraca pembayaran dari cadangan emas dan devisa. Pada 1965 cadangan emas dan devisa telah habis bahkan menunjukkan saldo negatif sebesar 3 juta dollar AS sebagai dampak politik konfrontasi Malaysia dan negara-negara barat. Panglaykim dan HW Arnt dalam *The Indonesian Economy: Facing a New Era?* (1966) mencatat krisis ekonomi ini berlangsung sejak 1960. Biaya pemerintah untuk proyek politik mercusuar seperti *Games of the New Emerging Forces* (Ganefo) pada 1963 dan *Conference of the Emerging Forces* (Conefo) pada 1965 membengkak. Buruknya perekonomian besarnya defisit anggaran belanja pemerintah pada 1961-1965 meningkat. Dari 29,7 persen pada 1961 menjadi 63,4 persen pada 1965. Sejak 1961, situasi moneter yang makin parah ditandai dengan laju inflasi yang tinggi (hiperinflasi). Pendapatan per kapita Indonesia turun secara signifikan antara 1962- 1963. Situasi semakin parah ketika Indonesia keluar dari PBB.

Pada 1965, tingkat peredaran uang naik hingga 161 persen. Sementara inflasi mencapai 592 persen. Bantuan asing berhenti karena Soekarno menolak bantuan dana sebesar 400 juta dollar AS dari International Monetary Fund (IMF). Investasi juga merosot tajam. Tahun 1965-1966 merupakan tahun yang kelam bagi masyarakat Indonesia, karena pada tahun itu Peristiwa Gerakan 30 September terjadi, para petinggi militer Indonesia ditangkap dan dibunuh oleh kelompok orang yang ingin mengkuudeta pemerintahan saat itu, beberapa kantor pemerintahan (diantaranya kantor RRI) juga berhasil diduduki oleh kelompok yang mengatasnamakan PKI (Partai Komunis Indonesia). Situasi tersebut mengakibatkan kondisi politik, militer, sosial dan ekonomi menjadi sangat kacau. Terlebih memang pada tahun-tahun itu Indonesia mengalami krisis ekonomi yang begitu hebat karena pemerintah dibawah pemerintahan Soekarno tidak berhasil mengendalikan laju perekonomian saat itu, kondisi politik yang terus mengalami perubahan juga berdampak akan hal itu sehingga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah mulai berkurang. Keadaan ekonomi saat itu mengalami stagflasi (stagnasi dan inflasi).

Pada bulan Agustus 1965 Soekarno menarik Indonesia dari hubungan-hubungan yang masih tersisa dengan dunia kapitalis (Dana Moneter Internasional/IMF, Interpol, Bank Dunia). Kini struktur sosial, tinggi, dengan harga-harga barang naik sekitar 500 persen selama politik, dan ekonomi bangsa Indonesia hampir runtuh. Inflasi sangat setahun itu. Diduga harga beras pada akhir tahun 1965 sedang naik sebesar 900 persen setiap tahun. Kurs pasar gelap untuk rupiah terhadap dolar Amerika jatuh dari Rp 5.100,00 pada awal tahun 1965 menjadi Rp 17.500,00 pada kuartal ketiga tahun itu dan Rp 50.000,00 pada kuartal keempat.

Rakyat kesulitan mendapat kebutuhan pokok. Defisit saldo neraca pembayaran dan defisit keuangan pemerintah sangat besar (1965: defisit 200% APBN). Jumlah pendapatan pemerintah rata-rata Rp 151 juta ('55- 65), sedangkan pengeluaran rata-rata 359 juta atau lebih dari 100% pendapatan. Kegiatan sektor pertanian dan sektor industri manufaktur relatif terhenti karena keterbatasan kapasitas produksi dan infrastruktur pendukung. Tingkat inflasi sangat tinggi, mencapai lebih dari 300 - 500% per tahun.

Ekonomi masyarakat Indonesia pada waktu itu yang sangat rendah mengakibatkan dukungan rakyat kepada Soekarno dan PKI meluntur. Inflasi yang mencapai 650% membuat harga makanan melambung tinggi, rakyat kelaparan dan terpaksa harus antri beras, minyak, gula, dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya. Beberapa faktor yang berperan kenaikan harga ini adalah keputusan Suharto- Nasution untuk menaikkan gaji para tentara 500% dan penganiayaan terhadap kaum pedagang Tionghoa yang menyebabkan mereka kabur. Sebagai akibat dari inflasi tersebut, banyak rakyat Indonesia yang sehari-hari hanya makan bonggol pisang, umbi-umbian, gaplek, serta bahan makanan

yang tidak layak dikonsumsi lainnya; mereka pun menggunakan kain dari karung sebagai pakaian mereka.

Faktor ekonomi ini menjadi salah satu sebab kemarahan rakyat atas pembunuhan keenam jenderal tersebut, yang berakibat adanya gerakan anti terhadap PKI dan timbul pembantaian orang-orang yang dituduh anggota PKI di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali serta tempat-tempat lainnya. Pemerintah melakukan Devaluasi pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi. Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidak menghemat Pengeluaran-pengeluarannya. Pada masa orde lama banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah, dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat Sekali lagi, ini juga salah satu konsekuensi dari pilihan menggunakan sistem demokrasi terpimpin yang bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke Timur (sosialis) baik dalam politik, ekonomi, maupun bidang-bidang lain.

Di kota-kota besar, kota-kota kecil, dan desa-desa kaum komunis maupun yang anti komunis merasa yakin akan cerita-cerita tentang sedang dipersiapkannya regu-regu pembunuh dan sedang disusunnya daftar calon para korbannya. Ramalan-ramalan, pertanda-pertanda, dan tindak kekerasan merajalela. Sejak akhir bulan September dengan berkumpulnya puluhan ribu tentara di Jakarta dalam rangka mempersiapkan peringatan Hari Angkatan Bersenjata pada tanggal 05 Oktober, dugaan-dugaan tentang akan terjadinya kudeta menjadi semakin santer. Pada tanggal 20 September, yakni akhirnya mengumumkan bahwa angkatan darat menentang pembentukan "angkatan kelima" Pada tanggal 30 September malam sampai 01 Oktober 1965 ketegangan-ketegangan meletus karena terjadinya percobaan kudeta di Jakarta. Pada tanggal 30 September 1965 malam struktur yang lemah tersebut hancur. Kejadian itu berlangsung berbulan-bulan sebelum akibat-akibatnya menjadi jelas, tetapi perimbangan kekuatan-kekuatan yang bermusuhan yang mendukung demokrasi terpimpin telah berakhir.

Kondisi Sosial Masyarakat Tahun 1965-1966

Peristiwa 1965 menjadi salah satu catatan hitam Indonesia. Di tahun tersebut, banyak warga mengalami kekerasan, baik dari militer maupun unsur sipil yang disponsori oleh militer. Peristiwa ini diawali dengan penculikan dan pembunuhan para Jendral pada 30 September 1965 (G30S). Partai Komunis Indonesia (PKI) dituding keras menjadi pelaku penculikan dan pembunuhan dalam peristiwa tersebut.

(PKI) pernah menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia. Kadernya berjumlah sekitar 300.000, sementara anggotanya diperkirakan sebanyak dua juta orang. Selain itu PKI juga mengatur serikat-serikat buruh.

Dukungan terhadap kepresidenan Soekarno bergantung pada koalisi "Nasakom" antara militer, kelompok agama, dan komunis Perkembangan pengaruh dan kemilitanan PKI, serta dukungan Soekarno terhadap partai tersebut, menumbuhkan kekhawatiran pada kelompok muslim dan militer. Ketegangan mulai menyelimuti perpolitikan Indonesia pada awal dan pertengahan tahun 1960-an. Upaya PKI untuk mempercepat reformasi tanah menggusarkan tuan-tuan tanah dan mengancam posisi sosial para kyai.

Pada tanggal 1 Oktober 1965, enam Jendral (tiga di antaranya dalam proses penjemputan paksa pada pagi hari, sedangkan tiga sisanya dan satu orang perwira menengah pada sore hari) dibunuh oleh kelompok yang menyebut diri mereka sebagai Dewan Revolusi namun Soeharto menamai gerakan Dewan Revolusi tersebut sebagai Gerakan 30 September, walau fakta sejarahnya aksi penjemputan paksa dilakukan pada jam empat pagi tanggal 1 Oktober 1965, untuk mendekati penyebutan Gestapu dengan sebutan Gestapo (Polisi Rahasia Nazi Jerman yang dikenal bengis dan kejam). Maka pemimpin-pemimpin utama militer Indonesia tewas atau hilang, sehingga Soeharto mengambil alih kekuasaan angkatan

bersenjata (yang dilakukan atas inisiatif sendiri tanpa berkoordinasi dengan Presiden Soekarno selaku pemangku jabatan Panglima Tertinggi menurut Undang-Undang dalam struktur komando di tubuh APRI). Pada 2 Oktober, ia mengendalikan Ibu Kota dan mengumumkan bahwa upaya kudeta telah gagal. Angkatan bersenjata menuduh PKI sebagai dalang peristiwa tersebut. Pada tanggal 5 Oktober, jenderal-jenderal yang tewas dimakamkan. Propaganda militer mulai disebar, dan menyerukan pembersihan di seluruh negeri. Propaganda ini berhasil meyakinkan orang-orang Indonesia dan pemerhati internasional bahwa dalang dari semua peristiwa ini adalah PKI. Penyangkalan PKI sama sekali tidak berpengaruh. Maka ketegangan dan kebencian yang terpendam selama bertahun-tahun pun meledak.

Pembersihan dimulai pada Oktober 1965 di Jakarta, yang selanjutnya menyebar ke Jawa Tengah dan Timur, dan Bali. Pembantaian dalam skala kecil dilancarkan di sebagian daerah di pulau-pulau lainnya, terutama Sumatra. Pembantaian terburuk meletus di Jawa Tengah dan Timur. Korban jiwa juga dilaporkan berjatuh di Sumatra utara dan Bali. Petinggi-petinggi PKI diburu dan ditangkap: petinggi PKI, Njoto, ditembak pada tanggal 6 November, ketua PKI Dipa Nusantara Aidit pada 22 November, dan Wakil Ketua PKI M.H. Lukman segera sesudahnya.

Kebencian terhadap komunis dikobarkan oleh angkatan darat, sehingga banyak penduduk Indonesia yang ikut serta dalam pembantaian ini. Peran angkatan darat dalam peristiwa ini tidak pernah diterangkan secara jelas. Di beberapa tempat, angkatan bersenjata melatih dan menyediakan senjata kepada milisi-milisi lokal. Di tempat lain, para vigilante mendahului angkatan bersenjata, meskipun pada umumnya pembantaian tidak berlangsung sebelum tentara mengenakan sanksi kekerasan.

Di beberapa tempat, milisi tahu tempat bermukimnya komunis dan simpatisannya, sementara di tempat lain tentara meminta daftar tokoh komunis dari kepala desa. Keanggotaan PKI tidak disembunyikan dan mereka mudah ditemukan dalam masyarakat. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menyediakan daftar 5.000 orang yang diduga komunis kepada angkatan bersenjata Indonesia. Beberapa cabang PKI melancarkan perlawanan dan pembunuhan balasan, tetapi sebagian besar sama sekali tidak mampu melawan. Tidak semua korban merupakan anggota PKI. Seringkali cap "PKI" diterapkan pada tokoh-tokoh Partai Nasional Indonesia (PNI) yang beraliran kiri. Dalam kasus-kasus lainnya, para korban merupakan orang-orang yang hanya dituduh atau diduga komunis.

Warga keturunan Tionghoa juga turut menjadi korban. Beberapa dari mereka dibunuh, dan harta benda mereka dijarah. Di Kalimantan Barat, sekitar delapan belas bulan setelah pembantaian di Jawa, orang-orang Dayak mengusir 45.000 warga keturunan Tionghoa dari wilayah pedesaan. Ratusan hingga ribuan di antara mereka tewas dibantai.

Metode pembantaian meliputi penembakan atau pemenggalan dengan menggunakan pedang Jepang. Mayat-mayat dilempar ke sungai, hingga pejabat-pejabat mengeluh karena sungai yang mengalir ke Surabaya tersumbat oleh jenazah. Di wilayah seperti Kediri, Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama menyuruh orang-orang komunis berbaris. Mereka lalu menggorok leher orang-orang tersebut, lalu jenazah korban dibuang ke sungai. Pembantaian ini mengosongkan beberapa bagian desa, dan rumah-rumah korban dijarah atau diserahkan ke angkatan bersenjata. Pembantaian telah mereda pada Maret 1966, meskipun beberapa pembersihan kecil masih berlangsung hingga tahun 1969. Penduduk Solo menyatakan bahwa meluapnya sungai Bengawan Solo yang tidak biasa pada Maret 1966 menandai berakhirnya pembantaian.

Jawa

Di Jawa, banyak pembunuhan dilakukan oleh simpatisan aliran. Militer mendorong para santri Jawa untuk mencari anggota PKI di antara orang-orang abangan Jawa. Pembunuhan meluas sampai pada orang-orang yang bukan anggota PKI. Di Jawa, contohnya, banyak orang yang dianggap "PNI kiri" dibunuh. Yang lainnya hanya dituduh atau merupakan korban fitnah dengan sedikit atau tanpa motif politik. Pada pertengahan Oktober, Soeharto

mengirim sejumlah pasukan komando kepercayaannya ke Jawa tengah, daerah yang memiliki banyak orang komunis, sedangkan pasukan yang kesetiannya tak jelas diperintahkan pergi dari sana. Pembantaian terhadap orang komunis kemudian dilakukan oleh para pemuda, dengan dipandu oleh angkatan bersenjata, memburu orang-orang komunis.

Konflik yang pernah pecah pada tahun 1963 antara partai Muslim Nahdlatul Ulama (NU) dan PKI berubah menjadi pembantaian pada minggu kedua Oktober. [23] Kelompok Muslim Muhammadiyah menyatakan pada awal November 1965 bahwa pembasmian "Gestapu/PKI" merupakan suatu Perang Suci. Pandangan tersebut didukung oleh kelompok-kelompok Islam lainnya di Jawa dan Sumatra, Bagi banyak pemuda, membunuh orang komunis merupakan suatu tugas keagamaan. Di tempat-tempat adanya pusat komunis di Jawa Tengah dan Jawa Timur, kelompok-kelompok Muslim menganggap bahwa mereka adalah korban serangan komunis supaya mereka memperoleh pembenaran atas pembantaian yang mereka lakukan. Mereka biasanya mengungkit-ungkit Peristiwa Madiun pada tahun 1948. Para pelajar Katolik di daerah Yogyakarta meninggalkan asrama mereka pada malam hari untuk ikut membunuh orang-orang komunis yang tertangkap.

Untuk sebagian besar daerah, pembantaian mereda pada bulan-bulan awal tahun 1966, namun di daerah-daerah tertentu di Jawa Timur pembantaian berlangsung sampai bertahun-tahun. Di Blitar, ada aksi gerilya yang dilakukan oleh anggota-anggota PKI yang selamat. Aksi tersebut berhasil diberantas pada 1967 dan 1968. Mbah Suro, seorang pemimpin kelompok komunis yang bercampur mistisisme tradisional, bersama para pengikutnya membangun pasukan. Dia dan kedelapan puluh pengikutnya terbunuh dalam sebuah perang perlawanan menghadapi angkatan bersenjata Indonesia.

Bali

Becermin dari melebarnya perbedaan sosial di seluruh Indonesia pada 1950-an dan awal 1960-an, di pulau Bali meletus konflik antara para pendukung sistem kasta tradisional Bali melawan orang-orang yang menolak nilai-nilai tradisional itu. Jabatan pemerintahan, uang dan keuntungan bisnis beralih pada orang-orang komunis pada tahun-tahun akhir masa kepresidenan Soekarno. Sengketa atas tanah dan hak-hak penyewa berujung pada pengambilan lahan dan pembantaian, ketika PKI mempromosikan "aksi unilateral". Setelah Soeharto berkuasa di Jawa, gubernur-gubernur pilihan Soekarno dicopot dari jabatannya. Orang-orang komunis kemudian dituduh atas penghancuran budaya, agama, serta karakter pulau Bali. Rakyat Bali, seperti halnya rakyat Jawa, didorong untuk menghancurkan PKI. Sebagai satu-satunya pulau yang didominasi Hindu di Indonesia, Bali tidak memiliki kekuatan Islam yang terlibat di Jawa, dan tuan tanah PNI menghasut pembasmian anggota PKI. Pendeta tinggi Hindu melakukan ritual persembahan untuk menenangkan para roh yang marah akibat pelanggaran yang kelewatan dan gangguan sosial. Pemimpin Hindu Bali, Ida Bagus Oka, memberitahu umat Hindu: "Tidakada keraguan [bahwa] musuh revolusi kita juga merupakan musuh terkejam dari agama, dan harus dimusnahkan dan dihancurkan sampai akar-akarnya."

Seperti halnya sebagian Jawa Timur, Bali mengalami keadaan nyaris terjadi perang saudara ketika orang-orang komunis berkumpul kembali. Keseimbangan kekuasaan beralih pada orang-orang Anti-komunis pada Desember 1965, ketika Angkatan Bersenjata Resimen Para-Komando dan unit Brawijaya tiba di Bali setelah melakukan pembantaian di Jawa. Komandan militer Jawa mengizinkan skuat Bali untuk membantai sampai dihentikan. Berkebaikan dengan Jawa Tengah tempat angkatan bersenjata mendorong orang-orang untuk membantai "Gestapu", di Bali, keinginan untuk membantai justru sangat besar dan spontan setelah memperoleh persediaan logistik, sampai-sampai militer harus ikut campur untuk mencegah anarki. Serangkaian pembantaian yang mirip dengan peristiwa di Jawa Tengah dan Jawa Timur dipimpin oleh para pemuda PNI berkaus hitam. Selama beberapa bulan, skuat maut milisi menyusuri desa-desa dan menangkap orang-orang yang diduga PKI. Antara Desember 1965 dan awal 1966, diperkirakan 80,000 orang Bali dibantai, sekitar

5 persen dari populasi pulau Bali saat itu, dan lebih banyak dari daerah manapun di Indonesia.

Sumatra

Tindakan PKI berupa gerakan penghuni liar dan kampanye melawan bisnis asing di perkebunan-perkebunan di Sumatra memicu aksi balasan yang cepat terhadap orang-orang komunis. Di Aceh sebanyak 40.000 orang dibantai, dari sekitar 200.000 korban jiwa di seluruh Sumatra. Pemberontakan kedaerahan pada akhir 1950-an semakin memperumit peristiwa di Sumatra karena banyak mantan pemberontak yang dipaksa untuk berafiliasi dengan organisasi-organisasi komunis untuk membuktikan kesetiaan mereka kepada Republik Indonesia. Berhentinya pemberontakan tahun 1950-an dan pembantaian tahun 1965 oleh kebanyakan masyarakat Sumatra dipandang sebagai "pendudukan suku Jawa". Di Lampung, faktor lain dalam pembantaian itu tampaknya adalah transmigrasi penduduk dari Jawa.

Peristiwa krisis nasional yang terjadi di Indonesia pada tahun 1965 merupakan salah satu lembaran kelam dalam sejarah Indonesia. Oleh pemerintah Orde Baru, lembaran kelam tersebut dikenal dengan Peristiwa G30S/PKI, mengapa demikian? Karena Pemerintahan Soeharto yang mewakili bagian dari Angkatan Darat (AD) yang pada waktu itu 1960-1965 merupakan musuh politik dari Partai Komunis Indonesia yang justru mengalami masa puncaknya dan berhasil membuat Presiden Soekarno memuji PKI sebagai kekuatan revolusi anti neokolonialisme yang didengung-dengungkan Soekarno. Pihak AD sebagai musuh politik PKI dan pada akhirnya juga menjadikan Soekarno sebagai target yang harus diganti karena dianggap terlalu melindungi PKI. PKI sebagai partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah Partai Komunis Uni Soviet dan Partai Komunis Cina, PKI memiliki basis massa yang cukup besar di Indonesia.

Krisis Nasional

Peristiwa Krisis Nasional 1965 menempatkan PKI dan juga pendukungnya sebagai pihak yang kemudian mengalami penghancuran baik oleh pihak aparat keamanan yang mendukung pihak AD dan juga dari musuh-musuh politik PKI di kalangan organisasi Islam yang selama tahun 1960-an mengalami penggayangan oleh PKI. Akibatnya banyak anggota dan simpatisan PKI yang terbunuh dalam konflik vertikal dan horizontal tersebut. Peristiwa tersebut kemudian dijadikan oleh para sastrawan Indonesia yang mengalami sendiri jaman itu menuliskannya secara imajinatif dalam tulisan cerita-cerita pendek mereka yang dimuat dalam majalah Sastra dan Horizon antara tahun 1966-1974. Dengan demikian peristiwa-peristiwa kemanusiaan yang muncul sebagai akibat peristiwa krisis nasional 1965 dijadikan sebagai latarbelakang dalam Penulisan karya kreatif mereka. Dengan caranya sendiri mereka para sastrawan tersebut membuat jalinan kisah-kisah kemanusiaan yang kadang dapat dibaca sebagai 'kenyataan' yang membuat para pembaca mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kehidupan dan kemanusiaan terkait dengan lembaran kelam yang pernah terjadi dalam sejarah Indonesia.

Memasuki tahun 1966 mengalami peralihan pemerintahan dari tangan Soekarno (Orde Lama) ke tangan Soeharto (Orde Baru) banyak kalangan menilai ini juga peralihan paham dari sosialis ke kapitalis. Kondisi saat itu benar-benar memperhatikan bagi rakyat. Pemerintah melakukan beberapa sasaran kebijakan terutama untuk menekan kembali tingkat inflasi, mengurangi defisit keuangan pemerintah, dan menghidupkan kembali kegiatan produksi, termasuk ekspor yang sempat mengalami stagnasi pada Orde Lama. Presiden Soeharto memulai Orde Baru dalam dunia pemerintahan Indonesia dengan mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. Salah satu kebijakan pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19 September 1966 mengumumkan bahwa Indonesia bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB, dan menjadi anggota PBB

kembali pada tanggal 28 September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya.

Beberapa langkah-langkah yang diambil Soeharto yang berkaitan dengan sosial ekonomi pada awal pemerintahannya ialah meminjam dana moneter IMF untuk perbaikan ekonomi Indonesia, kemudian ada sedikit langkah diskriminasi bagi orang tionghoa yang pada saat itu disingkirkan dari dunia politik praktis dan pembatasan-pembatasan ruang gerak seperti pelarangan seni barongsai, tidak adanya Hari raya Imlek, dan pelarangan penggunaan bahasa mandarin. Langkah-langkah tersebut disinyalir diambil karena arah politik Soeharto lebih ke dunia barat (Amerika) sedangkan tionghoa merupakan paham komunis sosialis. Akan tetapi kondisi ini terus diperjuangkan oleh orang-orang Tionghoa sehingga orang tionghoa boleh tetap bergerak, dan justru pergerakan mereka berkembang di perekonomian Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari tahun 1965 hingga 1966, Indonesia mengalami krisis ekonomi dan kondisi sosial yang menyebabkan pergolakan politik dan keamanan yang besar. Inflasi yang tinggi, penurunan ekspor dan investasi, dan kebijakan yang tidak berhasil menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang besar. Kondisi politik yang tidak stabil dan eskalasi ketegangan antara militer, partai politik, dan masyarakat menyebabkan peristiwa tragis seperti Gerakan 30 September, yang mengakibatkan pembunuhan massal anggota militer dan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Beberapa penyebab utama krisis ekonomi dan kondisi sosial ini termasuk kebijakan ekonomi yang tidak efektif, konfrontasi politik yang tidak menyenangkan, dan hubungan yang lebih buruk dengan negara-negara Barat. Situasi semakin memburuk karena keputusan politik kontroversial, seperti keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan penolakan bantuan luar negeri. Krisis tersebut memiliki dampak yang sangat luas, termasuk pembunuhan massal terhadap anggota militer dan PKI serta pembunuhan warga sipil yang diduga terkait dengan PKI. Selain itu, krisis tersebut menyebabkan ketidakstabilan politik yang berkepanjangan, yang pada akhirnya menyebabkan rezim "Orde Baru" yang dipimpin oleh Soeharto.

Saran

Salah satu kesimpulan dari analisis ini adalah bahwa kita perlu melakukan upaya untuk memahami dan mengatasi penyebab utama krisis ekonomi dan sosial ini. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan melakukan reformasi kebijakan ekonomi, memperbaiki hubungan internasional, dan lebih banyak berbicara dengan kelompok masyarakat yang berbeda untuk membangun rekonsiliasi dan memperkuat demokrasi. Oleh karena itu, Indonesia tidak perlu mengalami masa-masa kekacauan politik dan keamanan yang mengerikan seperti yang terjadi pada tahun 1965-1966.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmaliah, W. (2015). INDONESIA YANG DIBAYANGKAN: PERISTIWA 1965-1966 DAN KEMUNCULAN EKSIL INDONESIA. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 65-76.
- Ketut Sedana Arta, D. M. (2017). LADANG HITAM PASCA PERISTIWA GERAKAN 30 SEPTEMBER 1965. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 58-74.
- Martijn Eickhoff, G. v. (2019). 1965 Pada Masa Kini: Hidup dengan Warisan Peristiwa Pembantaian Massal. Yogyakarta: SANATA DHARMA UNIVERSITY PRESS.
- Rachman, N. F. (2011). Land Reform Dari Masa Ke Masa. Yogyakarta: Tanah Air Beta dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).
- Sipayung, B. A. (2011). The Collective memory of Indonesian 1965 exiles . *International Institute of Social Science Studies*, 1-40.